

# **BAB I**

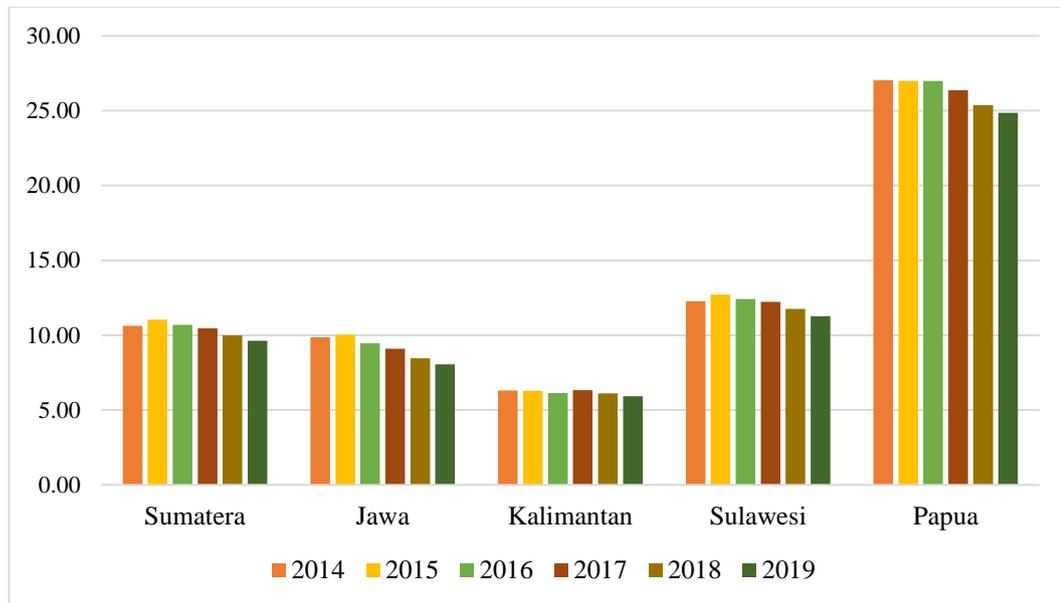
## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kemiskinan ialah kondisi ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, diantaranya pendidikan, tempat tinggal, makanan dan kesehatan (Fithri & Kaluge, 2017). Menurut BPS, kemiskinan ialah keadaan saat ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidup berupa pangan dan bukan pangan yang dilihat pada sisi pengeluarannya (BPS, Kemiskinan dan Ketimpangan, 2020). Kemiskinan ialah permasalahan sosial yang terus ada dalam hidup masyarakat, dimana kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat global, dimana kemiskinan telah menjadi perhatian dunia, dan permasalahan ini terdapat di setiap negara (Kemdikbud, 2016). Permasalahan kemiskinan berlangsung dalam waktu yang panjang dengan unsur pokok permasalahan yang menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Masalah ini merupakan permasalahan yang cukup penting dan perlu diantisipasi untuk menciptakan lingkungan suatu negara yang lebih damai dan makmur.

Teori kemiskinan oleh Nurkse menjelaskan bahwa adanya ketatarbelakangan, tidak sempurnanya pasar, modal yang kurang sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas ini menyebabkan penghasilan yang didapatkan menjadi rendah, sehingga berdampak pada minimnya investasi dan tabungan, dimana hal ini berdampak pada ketatarbelakangan dan kemiskinan (Kusdiyanti, 2015). Berikut disajikan data kemiskinan 5 Pulau di Indonesia Tahun 2014-2019.

**Grafik 1 Tingkat Kemiskinan Pulau-Pulau di Indonesia Tahun 2014-2019 (Persen)**



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2021

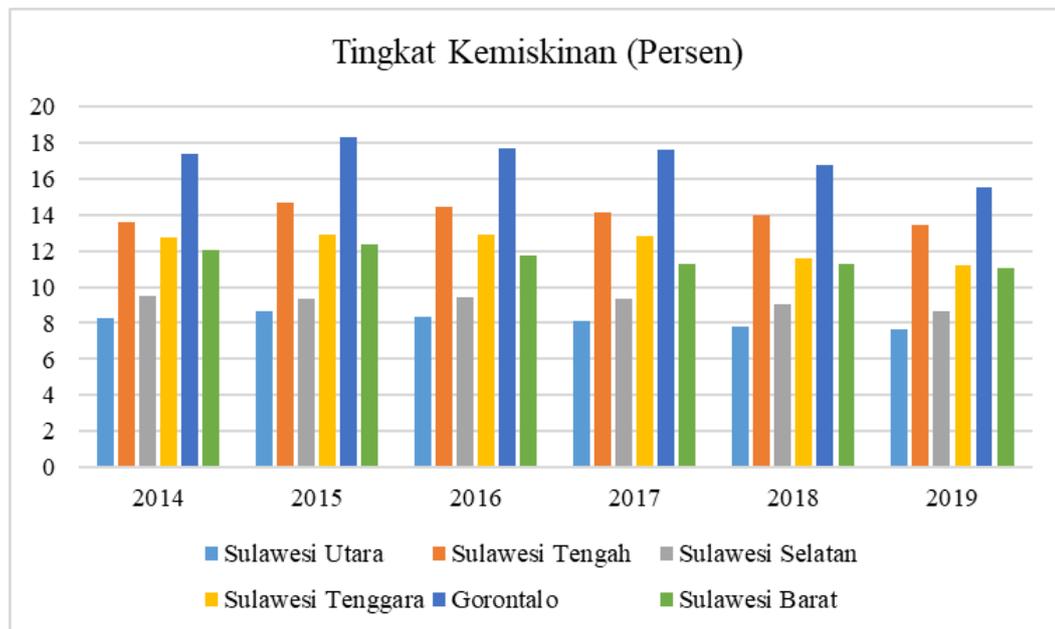
Indonesia terbagi menjadi 5 pulau besar, salah satunya ialah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana dalam mengembangkan perekonomian di Sulawesi memfokuskan pada aktivitas-aktivitas ekonomi pokok seperti perikanan, pertanian pangan, nikel dan kakao. Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Pulau Sulawesi merupakan bagian dari pintu gerbang Indonesia di bidang perdagangan internasional sebab letaknya strategis berada di tengah-tengah NKRI dengan laut yang menghubungkan benua Asia dan Australia. Namun jika dilihat pada grafik 1 di tahun 2014-2019 rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi kedua terletak di Pulau Sulawesi sebesar 12.11%. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Adapun jika dilihat tingkat kemiskinan berdasarkan provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi dari tahun 2014-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabita Maharani Wijaya, 2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

**Grafik 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2019 (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

Berdasarkan grafik 2, Provinsi Gorontalo menempati urutan pertama dengan rata-rata tingkat kemiskinan di tahun 2014-2019 besarnya 17.24%, sedangkan Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan rata-rata tingkat kemiskinan terendah dari tahun 2014-2019 sebesar 8.14%. Tingginya kemiskinan di Provinsi Gorontalo disebabkan karena perlambatan perekonomian Provinsi Gorontalo sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan (Bank Indonesia, 2015).

Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yaitu dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, jika struktur ekonomi di suatu wilayah tidak mendukung berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang tidak akan terserap dengan maksimal. Struktur ekonomi yang dimaksud yaitu sektor ekonomi yang lebih maju, yaitu struktur ekonomi yang lebih bergantung pada sektor sekunder (industri) dibandingkan sektor primer (pertanian). Hal ini diperkuat dengan model dua sektor (*two sector model*) oleh Lewis, dimana Lewis menyatakan bahwa jika kesejahteraan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja yang ingin dicapai lebih

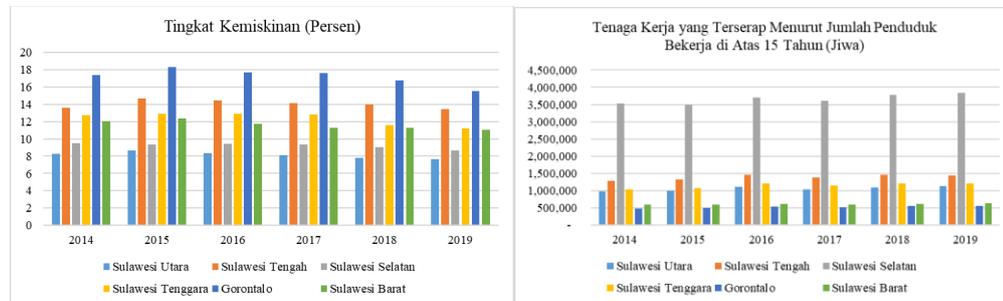
Tabita Maharani Wijaya, 2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

besar maka industri perlu diunggulkan sehingga kemiskinan akan menurun karena pendapatan yang diterima masyarakat bertambah (Hasan, 2017).

### Grafik 3 Tingkat Kemiskinan (Persen) dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jumlah Penduduk yang Bekerja di atas 15 Tahun Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2019 (jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

Grafik 3 menandakan bahwa tahun 2014-2019 penyerapan tenaga kerja provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi mengalami perlambatan, di tahun 2016 penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan bertambah dari 3,49 juta menjadi 3,69 juta hal ini disebabkan karena berimbas dari penyaluran dana ke desa serta dimulainya penerapan bagian dari paket kebijakan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang berdampak pada perbaikan pada lapangan pekerjaan yang tersedia (Bank Indonesia, 2016), namun pada tahun yang sama tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan dari 9.39% menjadi 9.40%, selanjutnya provinsi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah yaitu Provinsi Gorontalo dimana penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari 479 ribu jiwa menjadi 493 ribu jiwa di tahun 2015. Akan tetapi, di tahun yang bersamaan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo juga mengalami kenaikan dari 17.41% menjadi 18.32%, hal ini disebabkan karena adanya perlambatan ekonomi sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di Provinsi Gorontalo (Bank Indonesia, 2015). Fenomena ini menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak selalu memberikan dampak pada penurunan kemiskinan sehingga bertentangan dengan model dua sektor yang disampaikan oleh W. Arthur Lewis.

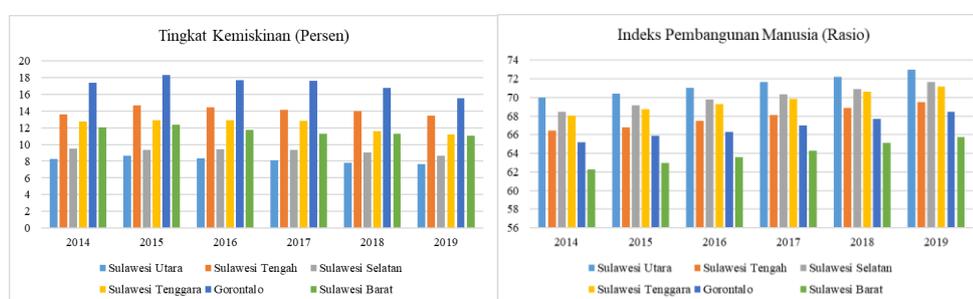
Tabita Maharani Wijaya, 2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor selanjutnya yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terlihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbentuk atas dasar tiga dimensi yakni kesehatan, pendidikan serta daya beli. Rendahnya modal manusia menyebabkan produktivitas menjadi rendah, hal ini mengakibatkan kemiskinan yang tinggi. (Desmintari & Aryani, 2019). Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2014-2019.

**Grafik 4 Tingkat Kemiskinan (Persen) dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2019 (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Modal manusia (*human capital*) termasuk bagian penting bagi proses pembangunan, khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Becker, analisis modal manusia merupakan suatu nilai yang menambahkan kualitas seorang pekerja. Jika pekerja memperoleh pengetahuan, keterampilan serta aset lain yang bermanfaat bagi penyedia kerja atau perusahaan serta bagi kegiatan produksi dan pertukaran. Berdasarkan grafik 4, diketahui bahwa IPM di Pulau Sulawesi dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan disetiap provinsinya. Adapun Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan IPM tertinggi sebesar 70.39 di tahun 2015, sedangkan di tahun yang bersamaan, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan 0.39% menjadi 8.65%, sehingga meningkatnya IPM tidak memberikan dampak pada tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2015. Selanjutnya IPM tertinggi kedua terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 66.76 di tahun 2015, akan tetapi tingkat kemiskinannya juga meningkat

Tabita Maharani Wijaya, 2022

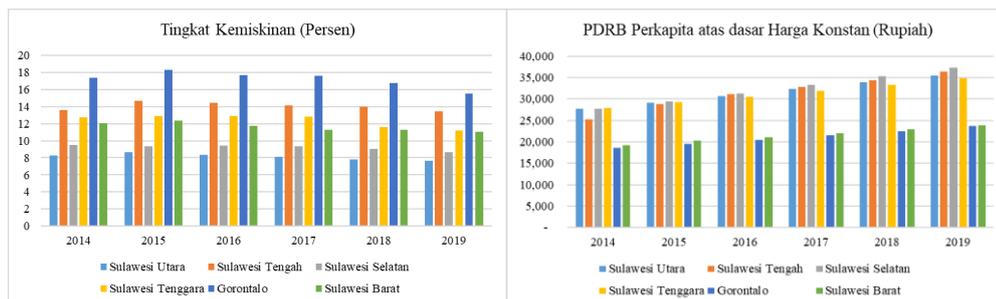
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.05% menjadi 14.66% sehingga peningkatan IPM tidak berdampak dalam menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyebab kemiskinan selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui PDRB Perkapita karena menyajikan secara jelas pertumbuhan ekonomi perkapita bagi penduduk di wilayah tertentu. Menurut teori *Tickle Down Effect* kesuksesan bagi sekelompok masyarakat memiliki dampak ke bawah sehingga tercipta lapangan pekerjaan serta kesempatan ekonomi lain yang akhirnya dapat membangkitkan berbagai kondisi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak langsung dalam menurunkan masalah kemiskinan karena terdapat aliran lurus dari penduduk kaya ke penduduk miskin (Pangiuk, 2018). Berikut disajikan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2014-2019.

**Grafik 5 Tingkat Kemiskinan (Persen) dan PDRB Perkapita atas dasar Harga Konstan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2019 (Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Pada grafik 5, menunjukkan bahwa PDRB perkapita di pulau Sulawesi dalam rentan waktu enam tahun terakhir selalu meningkat, hal ini dapat ditunjukkan provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 31,303 rupiah pada tahun 2016, namun jika kita lihat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 9.39% menjadi 9.40%. Wilayah dengan PDRB perkapita terendah yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 19,474 rupiah di tahun 2015, akan tetapi kemiskinan tahun yang sama juga terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar

Tabita Maharani Wijaya, 2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

17.41% naik menjadi 18.32%. Berdasarkan fenomena tersebut, meskipun selalu mengalami peningkatan, PDRB per kapita di Pulau Sulawesi tidak selalu berdampak pada pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini bertentangan dengan teori *Tickle Down Effect* yang dikemukakan oleh Albert Hirschman yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan kemiskinan.

Peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait masalah kemiskinan karena ditemukan pengaruh penyerapan tenaga kerja, IPM dan PDRB perkapita yang memiliki pengaruh negatif. Penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Muzdalifah dkk. (2019) yang menyatakan pengaruh signifikan negatif penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan, selanjutnya penelitian oleh Nurul Fadlillah dkk. (2016) dan Ahmad dkk (2019) IPM berpengaruh signifikan negatif pada kemiskinan, dan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadlillah (2016) dan Nelvi Oktaviani R. Gobel dan Sri Endang Saleh (2020) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif pendapatan perkapita terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilaksanakan Fajrin Hardinandar (2019) membuktikan tidak terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lian A. Yusuf dan Sri Indriyani Dai (2020) menjelaskan adanya pengaruh positif terhadap kemiskinan, dan penelitian yang dilaksanakan oleh Devito Frans dkk. (2017) menjelaskan pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Atas dasar perbedaan yang terdapat dari hasil penelitian (*research gap*) yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya serta penjelasan latar belakang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Pulau Sulawesi”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Atas dasar perolehan data melalui Biro Pusat Statistik dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi masih mengalami keadaan yang fluktuatif, sebab penyerapan tenaga kerja yang belum stabil, selain itu IPM dan

PDRB perkapita provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi yang selalu mengalami kenaikan nyatanya tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan. Dimana sesuai dengan teori *Vicious Circle of Poverty* yang menyatakan bahwa keterbelakangan, tidak sempurnanya pasar, dan modal yang kurang memiliki dampak pada produktivitas yang rendah, sehingga berdampak pada rendahnya penghasilan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tabungan dan investasi yang rendah sehingga kemiskinan meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah yang didapat sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi?
- b. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi?
- c. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

- a. Aspek teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru terkait pengaruh penyerapan tenaga kerja, indeks pembangunan manusia juga PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi, serta bisa digunakan sebagai bahan referensi kepada penelitian yang akan datang perihal sebab-sebab yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Tabita Maharani Wijaya, 2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

b. Aspek praktis

1) Bagi masyarakat

Sebagai informasi serta pengetahuan perihal sebab-sebab yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yakni penyerapan tenaga kerja, IPM dan PDRB perkapita sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah terkait pengambilan kebijakan sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi.